



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

L K I P

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

Jalan Sutan Syahrir Nomor 0532 ☎ 21034 📠 22011
PANGKALAN BUN

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa , karena atas rahmat dan karunia-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk tahun 2017 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, sedangkan maksud dari penyusunan LKIP ini adalah untuk memperoleh tingkat pencapaian kinerja tugas pokok dan fungsi dalam semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat yang pada akhirnya merupakan alat pengendali bagi pengambilan kebijakan dalam peningkatan kinerja.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian laporan ini, kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan maupun kelemahannya, untuk itu saran dan kritik serta masukan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan akuratnya laporan ini sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu memberikan bimbingan, taufiq dan hidayah-Nya serta perlindungan kepada kita semua, sehingga tugas dan tanggungjawab yang dibebankan dipundak kita selalu dapat kita laksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


Ir. AGUS YUWONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590814 198812 1 001

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai unsur teknis di Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi yang tepat dan cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran yang tepat pula, telah mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini. Adapun penyusunannya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun IKU yang telah ditetapkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat selama kurun waktu tahun 2017 – 2022 terdiri dari :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kinerja aparatur;
2. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang;
3. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (Konektifitas) di kabupaten;
4. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman;
5. Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai;
6. Presentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (>30 cm selama 2 jam, >2 kali setahun
7. Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh diperkotaan;
8. Jumlah kawasan Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa yang ditangani;
9. Jumlah embung dan bangunan penampung air yang ditangani;
10. Jumlah Sungai yang ditangani;
11. Jumlah kawasan banjir dan pantai yang ditangani;

Beberapa hal yang berkaitan dengan problema yang telah dan akan dihadapi dimasa datang telah dirumuskan strategi pemecahannya melalui aspek strategik organisasi, meliputi analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah awal dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), tantangan (*threats*) dan strategi pemecahan masalah.

I.1. DATA UMUM ORGANISASI

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu daerah otonom dalam kerangka wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat yang disertai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai unsur teknis di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.

Adapun kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

A. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai unsur teknis yang berkedudukan di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat

B. Tugas Pokok dan Fungsi.

Sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Barat nomor 48 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. Pembinaan dan penyusunan program dan kegiatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

I.2. ASPEK STRATEGIK ORGANISASI

Lingkungan strategis yang sangat berpengaruh terhadap organisasi Dinas terdiri dari aspek kekuatan (*strength*), aspek kelemahan (*weakness*), aspek peluang (*opportunities*) dan aspek hambatan (*threats*) atau melalui SWOT analisis.

Beberapa faktor kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dikemukakan sebagai berikut bahwa aspek kekuatan dan kelemahan merupakan potensi yang terkandung dalam tubuh organisasi. Kekuatan merupakan suatu keunggulan kompetitif dan komperatif yang dapat dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan kelemahan harus dimobilisasi dan dioptimalkan agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat dikendalikan.

Adapun kekuatan dan kelemahan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan.

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu ketersediaan alat berat dan alat-alat laboratorium.
2. Adanya upaya pengendalian banjir.

b. Kelemahan.

1. Kualitas dan kinerja aparatur Dinas dianggap masih kurang disiplin
2. Penerapan sistem informasi dan teknologi yang belum maksimal
3. Konektivitas antar wilayah di kabupaten masih perlu dibenahi
4. Kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan di kabupaten
5. Estetika infrastruktur perkotaan
6. Ketersediaan sanitasi permukiman dan air bersih perdesaan
7. Ketersediaan dokumen penataan ruang
8. Pengelolaan dan pengembangan irigasi
9. Ketersediaan sumber air baku
10. Pembinaan jasa konstruksi daerah

Aspek peluang dan hambatan adalah merupakan faktor yang menjadi perhatian bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana dan pengendali pembangunan.

a. Peluang tersebut adalah :

- Tingkat kepatuhan terhadap tata ruang
- Pengembangan infrastruktur merupakan Arah kebijakan nasional

b. Hambatan adalah :

- Kondisi alam (cuaca/iklim)
- Kuantitas & Kualitas Sumber Daya Manusia pada Badan Usaha Jasa Konstruksi

I.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat. adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program.
3. Bidang terdiri dari :
 - a. Kepala Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - 1) Kepala Seksi Irigasi dan Rawa;
 - 2) Kepala Seksi Bina Penatagunaan dan Pengembangan Jaringan SDA;
 - 3) Kepala Seksi Sungai dan Pantai.
 - b. Kepala Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1) Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 - 2) Kepala Seksi Jalan;
 - 3) Kepala Seksi Jembatan.
 - c. Kepala Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - 1) Kepala Seksi Perencanaan Cipta Karya;
 - 2) Kepala Seksi Tata Bangunan & Lingkungan Permukiman;
 - 3) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum.
 - d. Kepala Bidang Penataan Ruang:
 - 1) Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang;
 - 2) Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 3) Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang.
 - e. Kepala Bidang Bina Konstruksi:
 - 1) Kepala Seksi Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi;
 - 2) Kepala Seksi Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi;
 - 3) Kepala Seksi Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :
- a. Kepala UPTD Alat Berat
 - b. Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi.

Untuk aspek kepegawaian, sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 48 Tahun 2016 bahwa sampai dengan akhir Desember 2017 jumlah pegawai organik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Aspek Kepegawaian Dinas PUPR Tahun 2017

No.	Golongan	Per 31 Desember 2017
1.	Golongan I/a	-
	Golongan I/b	-
	Golongan I/c	1
	Golongan I/d	1
	Jumlah Golongan I	2
2.	Golongan II/a	2
	Golongan II/b	3
	Golongan II/c	17
	Golongan II/d	3
	Jumlah Golongan II	25
3.	Golongan III/a	8
	Golongan III/b	16
	Golongan III/c	9
	Golongan III/d	9
	Jumlah Golongan III	42
4.	Golongan IV/a	5
	Golongan IV/b	1
	Golongan IV/c	1
	Golongan IV/d	-
	Golongan IV/e	-
	Jumlah Golongan IV	7
	Jumlah Pegawai	76

Tingkat pendidikan pegawai organik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas adalah sebagai berikut :

a. Berijazah SD	:	1	orang
b. Berijazah SLTP	:	1	orang
c. Berijazah SLTA	:	31	orang
d. Berijazah Sarjana Muda/D3	:	6	orang
e. Berijazah Sarjana (S1)/D4	:	27	orang
f. Berijazah Sarjana (S2)	:	9	orang
Jumlah	:	76	orang

I.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
I.1.	Data Umum Organisasi
I.2.	Aspek Strategis Organisasi
I.3.	Struktur Organisasi
I.4.	Sistematika Penyajian
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
II.1.	Rencana Strategis
II.2.	Perjanjian Kinerja
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
III.1.	Capaian Kinerja Organisasi
III.2.	Realisasi Anggaran
BAB IV	PENUTUP

II.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) tahun 2017 – 2022 yang merupakan dokumen perencanaan strategis sebagai tolak ukur pelaksanaan APBD.

Perencanaan strategis (Renstra) juga merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sampai lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan dinas berdasarkan tolak ukur kinerja yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sesuai amanat masyarakat di era reformasi, maka Renstra yang disusun oleh dinas ini harus dapat menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat. Hal yang lebih penting lagi adalah bahwa Renstra ini harus dapat menggambarkan keutuhan tanggung jawab Dinas dalam implementasinya berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi dari seluruh sumber daya yang ada agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Oleh sebab itu, maka pelaksanaan Renstra dinas ini harus dipertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

II.1.1 VISI DAN MISI

Sebagaimana diketahui bahwa visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah **“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”**. Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

Relevansi tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap visi dan misi tersebut di atas adalah pada **misi ketiga yaitu Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup**. Selama lima tahun terakhir, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat telah berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan kesenjangan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Percepatan pembangunan infrastruktur ke depan akan diarahkan sebagai berikut :

1. Percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan yaitu desa menuju kota dan meningkatkan kualitas jalan antar desa dan desa ke kecamatan;
2. Peningkatan kualitas jalan-jalan strategis dan penghubung untuk lintas ekonomi guna pemenuhan sembilan bahan pokok dan secara khusus jalan pertanian untuk memudahkan perdagangan hasil bumi dan pertanian;
3. Pembangunan jalan lingkar luar kabupaten;
4. Penuntasan pembangunan jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama;
5. Pembukaan jalan kecamatan arut utara ke kabupaten;
6. Pembangunan jembatan penghubung antar desa dengan kecamatan yang melalui sungai;
7. Pemetaan jalan umum dan lingkungan serta peningkatan kelas jalan;
8. Pembangunan Water Front City;
9. Penyempurnaan sistem dan mekanisme penanganan proyek untuk efisiensi dan menekan kebocoran anggaran;
10. Pelaksanaan pembangunan dengan prioritas, merata, seimbang dan tepat guna;
11. Rehabilitasi infrastruktur yang rusak dan yang tidak sesuai peruntukannya;
12. Perawatan infrastruktur secara berkala dan cepat tepat penanganannya;
13. Pengadaan sarana dan prasarana yang lebih modern dan canggih;
14. Melanjutkan dan meningkatkan saluran irigasi serta normalisasi saluran;
15. Penyediaan konservasi air dan penyediaan air baku;
16. Pengelolaan dan pengendalian sumber daya air yg komprehensif untuk antisipasi banjir dan kekeringan.

II.1.2 TUJUAN

Pembangunan bidang sarana dan prasarana diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar agar dapat menjamin keberlangsungan fungsi masyarakat atau rumah tangga, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, memperkecil kesenjangan, dan mewujudkan keadilan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dalam pelaksanaan program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
2. Mengoptimalkan pembinaan jasa konstruksi daerah;
3. Meningkatkan kualitas layanan kota-desa;
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat;
5. Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan;
6. Meningkatkan kapasitas tampung sumber-sumber air baku
7. Mengendalikan banjir pada daerah genangan air dan mengamankan pantai dari erosi dan abrasi;
8. Menyediakan informasi tata ruang.

II.1.3 SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dalam pelaksanaan program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja aparatur
2. Meningkatnya informasi jasa konstruksi dilakukan secara aktif dan berkala melalui SIPJAKI
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan di kabupaten
4. Meningkatnya konektivitas wilayah di kabupaten
5. Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman
6. Berkurangnya permukiman kumuh diperkotaan
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan irigasi
8. Tersedianya sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
9. Meningkatnya kapasitas pengendali daya rusak air
10. Meningkatnya upaya pengamanan pantai
11. Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang

II.1.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat yang diemban. Adapun IKU yang telah ditetapkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat selama kurun waktu tahun 2017 – 2022 terdiri dari :

1. Persentase realisasi fisik kegiatan;
2. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang;
3. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (Konektifitas) di kabupaten;
4. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman;

5. Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai;
 6. Presentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (>30 cm selama 2 jam, >2 kali setahun
 7. Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh diperkotaan;
 8. Jumlah kawasan Daerah irigasi dan daerah Irigasi Rawa yang ditangani;
 9. Jumlah embung dan bangunan penampung air yang ditangani;
 10. Jumlah Sungai yang ditangani;
 11. Jumlah kawasan banjir dan pantai yang ditangani;
- Adapun target dari setiap IKU tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.

II.1.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan. Adapun rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun anggaran 2017 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor: 910/32/II/DPPA-SKPD/2017 tanggal 23 Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Program dan Kegiatan Tahun 2017

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (Rp)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	303.000.000,00
		- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	37.647.000,00
		- Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.484.664.100,00
		- Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.535.000,00
		- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	28.250.000,00
		- Penyediaan alat tulis kantor	166.941.500,00
		- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	56.250.000,00
		- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.870.000,00
		- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	528.469.000,00
		- Penyediaan makanan dan minuman	438.845.000,00
		- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	705.000.000,00

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (Rp)
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	106.540.000,00
		- Pengadaan Mebeleur	63.025.000,00
		- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	284.800.000,00
		- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	88.000.000,00
		- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.000.000,00
		- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	300.000.000,00
		- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	106.540.000,00
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	92.733.300,00
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	195.000.000,00
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	637.500,00
		- Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.200.000,00
		- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.200.000,00
6.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	- Pembangunan jalan	9.071.986.450,00
		- Pembangunan jembatan	13.321.177.000,00
		- Peningkatan jalan	112.757.782.500,00
		- Peningkatan jalan lingkungan pemukiman	36.093.364.700,00
7.	Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong	- Pembangunan Saluran Drainase/ gorong-gorong	13.134.501.400,00
8.	Pembangunan Turap/Talud/Brojong	- Pembangunan turap/talud/bronjong	1.622.514.400,00
9.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	5.105.369.350,00
		- Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	622.822.000,00
10.	Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan	- Penyusunan sistem informasi/data base jalan	99.165.000,00
		- Penyusunan sistem informasi/data base jembatan	95.562.500,00
11.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	- Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	359.260.400,00
		- Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	819.936.400,00
		- Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	23.518.000,00
12.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	- Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	479.100.000,00
		- Pembangunan pintu air	3.065.021.000,00
		- Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	6.098.797.000,00
		- Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	5.120.779.800,00
		- Peningkatan Fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	182.650.000,00
		- Pembangunan jaringan irigasi	5.651.162.000,00
		- Peningkatan jaringan irigasi	6.793.488.300,00

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (Rp)
13.	Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	- Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	2.220.067.100,00
14.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	- Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	4.078.450.000,00
		- Pengembangan distribusi air minum	6.083.948.800,00
15.	Pengendalian Banjir	- Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	3.225.420.800,00
		- Pembangunan prasarana pengaman pantai	2.064.317.000,00
16.	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	- Perencanaan pengembangan infrastruktur	2.128.780.000,00
		- Pembangunan/peningkatan infrastruktur	6.528.852.000,00
17.	Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan	- Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	403.901.500,00
		- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan	2.157.741.200,00
		- Peningkatan jalan perdesaan	10.578.535.000,00
T O T A L			264.885.579.000,00

II.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagaimana yang termuat dalam lampiran 1.

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi diperoleh berdasarkan pengukuran atas pencapaian kinerja sasaran dengan memperhatikan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan pada rencana strategis (RENSTRA). Untuk menentukan capaian kinerja sasaran digunakan pengukuran melalui skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Ordinal

Urutan	Skala Pengukuran Ordinal	Kategori
I	$X > 100\%$	Sangat Berhasil
II	$91\% < X \leq 100\%$	Berhasil
III	$81\% < X \leq 90\%$	Cukup Berhasil
IV	$X \leq 81\%$	Kurang Berhasil

Berikut ini adalah pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2017 :

Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan kualitas pelayanan kinerja aparatur	Persentase realisasi fisik kegiatan	100%	100%	100
2.	Peningkatan kualitas layanan kota-desa melalui peningkatan infrastruktur jalan kabupaten	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	77,57 %	134,27 %	173.10
3.	Peningkatan konektivitas wilayah di kabupaten	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (Konektifitas) di kabupaten	77,46 %	71,44 %	92,23
4.	Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	77 %	66,8 %	86,75
		Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	85 %	84,5 %	99.41
		Presentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (>30 cm selama 2 jam, >2 kali setahun	75 %	76,7 %	102.27
5.	Berkurangnya permukiman kumuh diperkotaan	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh diperkotaan	72,60 %	65 %	89.53
6.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Irigasi terpadu	Jumlah kawasan Daerah irigasi dan daerah Irigasi Rawa yang ditangani	20 DI+DIR	20 DI+DIR	100
7.	Meningkatkan kapasitas tampung sumber - sumber air	Jumlah embung dan bangunan penampung air yang ditangani	8 Embung	8 Embung	100

8.	Meningkatnya kapasitas pengendali daya rusak air dan Meningkatnya upaya konservasi sumber daya air	Jumlah Sungai yang ditangani	9 Sungai	9 Sungai	100
		Jumlah kawasan banjir dan pantai yang ditangani	7 Kawasan	7 Kawasan	100
	8 Sasaran	11 IKU			103,94

Tabel diatas menunjukan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 dihitung dari 11 indikator kinerja untuk mencapai 8 sasaran dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 103,94% (sangat berhasil). Adapun rincian capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja utama (IKU) dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Peningkatan kualitas pelayanan kinerja aparatur

Sasaran	IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
Peningkatan kualitas pelayanan kinerja aparatur	Persentase realisasi fisik kegiatan	100%	100%	100

Tabel diatas menunjukan capaian kinerja untuk merealisasikan sasaran peningkatan kualitas pelayanan kinerja aparatur pada tahun 2017 dihitung dari 1 indikator kinerja yaitu persentase realisasi fisik kegiatan diperoleh capaian sasaran sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan baik melalui program dan kegiatan rutin dinas sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dimana sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 3.758.471.600,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.261.053.279,61,- (86.77%) dan secara fisik telah direalisasikan 100% melalui kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan, kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, kegiatan penyediaan alat tulis kantor, kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, kegiatan penyediaan makanan dan minuman, serta kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Program ini memberikan efisiensi anggaran senilai Rp. 497.418.320,- atau 13,23 %.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dimana sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 848.365.000,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 811.208.670,00,- (95,62%) dan secara fisik telah direalisasikan 100% melalui kegiatan pembangunan gedung kantor, kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor, kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanal, kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor. Program ini memberikan efisiensi anggaran senilai Rp. 37.156.330,- atau 4,38 %.

3. Program peningkatan disiplin aparatur, dimana sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 92.733.300,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 92.733.300,00,- (100%) dan secara fisik telah direalisasikan 100% melalui kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Program ini memberikan serapan anggaran 100%.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dimana sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 195.000.000,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 191.532.497,00,- (98,22 %) dan secara fisik telah direalisasikan 100% melalui kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Program ini memberikan efisiensi anggaran senilai Rp. 3.467.503,- atau 1,78 %.
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dimana sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 3.037.500,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.036.750,00,- (99,98 %) dan secara fisik telah direalisasikan 100% melalui kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran, kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. Program ini memberikan efisiensi anggaran senilai Rp. 750,- atau 0,02 %.



Pengadaan perlengkapan kantor



Pengadaan kursi rapat

Sasaran 2: Peningkatan kualitas layanan kota-desa melalui peningkatan infrastruktur jalan kabupaten

Sasaran	IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
Peningkatan kualitas layanan kota-desa melalui peningkatan infrastruktur jalan kabupaten	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	77,57%	134,27%	173,10

Tabel diatas menunjukan capaian kinerja untuk merealisasikan sasaran peningkatan kualitas layanan kota-desa melalui peningkatan infrastruktur jalan kabupaten pada tahun 2017 dihitung dari 1 indikator kinerja yaitu persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang diperoleh capaian sasaran sebesar 173,10%. Hal tersebut menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan baik melalui dukungan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, dimana sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 5.728.191.350,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.607.714.560,00,- (97,90 %) dan secara fisik telah direalisasikan 100% pada 2 kegiatan yaitu rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan. Program ini dimaksudkan untuk menangani pemeliharaan jalan dan jembatan yang tersebar di seluruh kecamatan. Pemeliharaan tersebut berupa pemeliharaan yang dilakukan secara rutin maupun periodik meliputi pemeliharaan jalan 22 paket dan pemeliharaan jembatan 8 paket. Program ini memberikan efisiensi anggaran senilai Rp. 120.476.790,- atau 2,10 %.



rehabilitasi/pemeliharaan jalan



rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Sasaran 3 : Peningkatan konektivitas wilayah di kabupaten.

Sasaran	IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
Peningkatan konektivitas wilayah di kabupaten	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (Konektifitas) di kabupaten	77,46%	71,44%	92.23

Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja untuk merealisasikan sasaran peningkatan konektivitas wilayah di kabupaten tahun 2017 dihitung dari 1 indikator kinerja yaitu Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (Konektifitas) di kabupaten diperoleh capaian sasaran sebesar 92,23%. Hal tersebut menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan belum tercapai secara maksimal dikarenakan keterbatasan dana pemerintah sehingga pembangunan perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan skala prioritas.



pembangunan jalan



pembangunan jembatan

Pada tahun 2017 pencapaian kinerja ini didukung melalui program dan kegiatan berikut :

1. Program pembangunan jalan dan jembatan, dimana sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 171.244.310.650,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 170.708.027.150,00,- (99,69%) dan secara fisik telah direalisasikan 100% pada 4 kegiatan yaitu pembangunan jalan, pembangunan jembatan, peningkatan jalan, dan peningkatan jalan lingkungan pemukiman. Pembangunan jalan pada tahun 2017 ditargetkan 16 paket dan secara keseluruhan terealisasi 100%. Melalui program ini juga telah dilaksanakan pembangunan jembatan sebanyak 17 paket, peningkatan jalan 32 paket dan peningkatan jalan lingkungan pemukiman sebanyak 190 paket. Program ini memberikan efisiensi anggaran senilai Rp. 536.283.500, - atau 0,31 %.
2. Program penyusunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan, dimana sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 194.727.500,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 194.727.500,00,- (100,00 %) dan secara fisik telah direalisasikan 100% pada 2 kegiatan yaitu penyusunan sistem informasi/data base jalan dan penyusunan sistem informasi/data base jembatan. Output dari program ini berupa penyediaan dokumen hasil survey kondisi jalan dan jembatan yang mana dokumen tersebut menjadi data base guna menunjang perencanaan pembangunan yang lebih terarah. Program ini memberikan serapan anggaran 100%.

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan

Sasaran	IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	77 %	66.8 %	86.75
	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	85 %	84.5 %	99.41
	Presentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (>30 cm selama 2 jam, >2 kali setahun	75 %	76.7 %	102.27
Jumlah capaian rata-rata				96.14

Tabel diatas menunjukan capaian kinerja untuk merealisasikan sasaran Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan pada tahun 2017 dihitung dari 3 indikator kinerja yaitu persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman diperoleh capaian sasaran sebesar 86.75 %, persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai diperoleh capaian sasaran sebesar 99,41% dan presentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (>30 cm selama 2 jam, >2 kali setahun diperoleh capaian sasaran sebesar 102,26%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan walaupun 2 indikator tidak tercapai tetapi satu indikator berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dan dapat direalisasikan dengan baik. Kedua indikator yang belum tercapai ditahun 2017 akan ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya dengan adanya dukungan dana dari pemerintah.



Jaringan air bersih



Saluran drainase

Pada tahun 2017 pencapaian kinerja ini didukung melalui program dan kegiatan berikut:

1. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dimana sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 10.162.398.800,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 10.077.541.400,00,- (99,16%) dan secara fisik telah direalisasikan 100% pada 2 kegiatan yaitu penyediaan prasarana dan sarana air limbah serta kegiatan

Pengembangan distribusi air minum. Program ini memberikan efisiensi anggaran senilai Rp. 84.857.400,- atau 0,84%.

- 2. Program program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong pada kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dimana kegiatan ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 13.134.501.400,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 13.080.844.000,00,- (99,59%) dan secara fisik telah direalisasikan 100%. Kegiatan ini memberikan efisiensi anggaran senilai Rp. 53.657.400,- atau 0,41%.

Sasaran 5 : Berkurangnya permukiman kumuh diperkotaan.

Sasaran	IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
Berkurangnya permukiman kumuh diperkotaan.	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh diperkotaan	72.60%	65%	89,53

Tabel diatas menunjukan capaian kinerja untuk merealisasikan sasaran berkurangnya permukiman kumuh diperkotaan pada tahun 2017 dihitung dari 1 indikator kinerja yaitu persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh diperkotaan diperoleh capaian sasaran sebesar 89,53%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat target kinerja yang belum tercapai dengan baik ditahun 2017, namun demikian target ini akan terus ditingkatkan pencapaiannya dengan mengarahkan pembangunan yang akan mendukung sasaran berkurangnya permukiman kumuh diperkotaan.



pembangunan infrastruktur



pembangunan infrastruktur

Pada tahun 2017 pencapaian kinerja ini didukung melalui program dan kegiatan berikut :

- 1. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, dimana sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 8.657.632.000,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 8.514.757.500,00,- (98,35%) dan secara fisik telah direalisasikan 100% pada kegiatan perencanaan pengembangan infrastruktur dan pembangunan/peningkatan infrastruktur. Program ini memberikan efisiensi anggaran senilai Rp. 30.828.320,- atau 0,28%.
- 2. Program pembangunan infrastruktur perdesaan, dimana sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 13.140.177.700,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 13.012.255.900,00,- (99,03%) dan secara fisik telah direalisasikan 100% pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan, rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan perdesaan, dan Peningkatan jalan perdesaan. Program ini memberikan efisiensi anggaran senilai Rp. 127.921.800,- atau 0,97%.

Sasaran 6 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Irigasi terpadu

Sasaran	IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Irigasi terpadu	Jumlah kawasan Daerah irigasi dan daerah Irigasi Rawa yang ditangani	20 DI+DIR	20 DI+DIR	100

Tabel diatas menunjukan capaian kinerja untuk merealisasikan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Irigasi terpadu pada tahun 2017 dihitung dari 1 indikator kinerja yaitu Jumlah kawasan Daerah irigasi dan daerah Irigasi Rawa yang ditangani diperoleh capaian sasaran sebesar 100% yang berarti memenuhi target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra).



Daerah irigasi

Adapun program yang telah dilakukan pada tahun 2017 guna mendukung sasaran tersebut adalah melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 27.390.998.100,00,- dengan realisasi anggaran Rp. 26.414.787.491,00,- (96,44%) dan secara fisik telah direalisasikan 100% pada 7 kegiatan yaitu perencanaan pembangunan jaringan irigasi, pembangunan pintu air, Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai, Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun, Pembangunan jaringan irigasi, Peningkatan jaringan irigasi. Program ini memberikan efisiensi anggaran senilai Rp. 976.210.609,- atau 3,56%.

Sasaran 7 : Meningkatkan kapasitas tampung sumber - sumber air.

Sasaran	IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
Meningkatkan kapasitas tampung sumber - sumber air	Jumlah embung dan bangunan penampung air yang ditangani	8 embung	8 embung	100

Tabel diatas menunjukan capaian kinerja untuk merealisasikan sasaran meningkatkan kapasitas tampung sumber - sumber air pada tahun 2017 dihitung dari 1 indikator kinerja yaitu Jumlah embung dan bangunan penampung air yang ditangani, diperoleh capaian sasaran sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan dapat dapat direalisasikan dengan baik melalui dukungan program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya lainnya, dimana sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 2.220.067.100,00,- dengan realisasi anggaran Rp 2.215.878.100,00,- (99.81%) dan secara fisik telah direalisasikan 100% pada kegiatan Pembangunan embung dan bangunan penampungan air lainnya sebanyak 11 paket pekerjaan.



embung

Sasaran 8 : Meningkatnya kapasitas pengendali daya rusak air dan Meningkatnya upaya konservasi sumber daya air

Sasaran	IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)
Meningkatnya kapasitas pengendali daya rusak air dan Meningkatnya upaya konservasi sumber daya air	Jumlah Sungai yang ditangani	9 sungai	9 sungai	100
	Jumlah kawasan banjir dan pantai yang ditangani	7 kawasan	7 kawasan	100
	Jumlah capaian rata-rata			100

Tabel diatas menunjukan capaian kinerja untuk merealisasikan sasaran meningkatnya kapasitas pengendali daya rusak air dan Meningkatnya upaya konservasi sumber daya air pada tahun 2017 dihitung dari 2 indikator kinerja yaitu jumlah Sungai yang ditangani, dan jumlah kawasan banjir dan pantai yang ditangani diperoleh capaian sasaran sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan baik.



bangunan pengaman pantai

Pada tahun 2017 pencapaian kinerja ini didukung melalui program dan kegiatan berikut :

1. Program pengendalian banjir, dimana sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 8.657.632.000,00,- dengan realisasi anggaran Rp 8.514.757.500,00,- (98.35%) dan secara fisik telah direalisasikan 100% pada kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai dan pembangunan prasarana pengaman pantai.
2. Program Pembangunan turap/talud/bronjong, dimana sektor ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 1.622.514.400,00,- dengan realisasi anggaran Rp 1.603.451.800,00,- (98.83%) dan secara fisik telah direalisasikan 100% pada kegiatan Pembangunan turap/talud/bronjong. Program ini memberikan efisiensi anggaran senilai Rp. 19.062.600,- atau 1,17%.

III.2. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.3. : Realisasi Pendapatan dan Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kobar TA. 2017

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Pendapatan	1.565.988.500,00,-	1.952.344.500,00,-	124,67
	a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah	1.565.988.500,00,-	1.952.344.500,00,-	124,67
2.	Belanja	271.311.339.000,00,-	268.449.066.006,61,-	98,94
	a. Belanja tidak langsung	6.425.760.000,00,-	6.270.077.509,00,-	97,57
	b. Belanja langsung	264.885.579.000,00,-	262.178.988.497,61,-	98,97
	Surplus / (Defisit)	(269.745.350.500,00,-)	(266.496.721.506,61,-)	98,79

Sumber : Laporan Keuangan Dinas PU TA.2017

Berdasarkan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA–SKPD) No. 910/32/II/DPPA-SKPD/2017 tanggal 23 Oktober 2017 bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat menganggarkan jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.565.988.500,00,- dan anggaran belanja (langsung dan tidak langsung) sebesar Rp. 271.311.339.000,00,- dengan perincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 6.425.760.000,00,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 264.885.579.000,00,-. Sampai akhir Desember 2017 anggaran belanja telah terealisasi (belanja langsung dan tidak langsung) sebesar Rp. 268.449.066.006,61,- atau sebesar 98,94%. Dibandingkan dengan tahun 2017, maka persentase realisasi anggaran belanja mengalami **Penurunan** dari 99,41% pada tahun 2016 menjadi 98,94% pada tahun 2017. Salah satu faktor penyebab penurunan realisasi anggaran yaitu ditahun 2017 terdapat 5 paket pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sesuai kontrak dikarenakan kelangkaan material kayu ulin yang menjadi material utama dari pekerjaan tersebut.

Apabila dilihat dari realisasi antara pendapatan dan belanja daerah terdapat perbedaan yang cukup besar, dimana realisasi belanja daerah selama tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 268.449.066.006,61,- dan pendapatan hanya Rp. 1.952.344.500,00,- sehingga terjadi defisit anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. (266.496.721.506,61,-).

Sedangkan untuk perincian realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5. : Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung & Langsung TA. 2017

No.	Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Langsung 2017	Diterima (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%
I.	Belanja Tidak Langsung				
1.	Belanja pegawai	6.425.760.000,00	6.270.077.509,00	156.682.491,00	97,57
II.	Belanja Langsung				
2.	Belanja pegawai	4.134.976.120,00	3.544.124.800,00	590.851.320,00	85,71
3.	Belanja barang dan jasa	34.507.442.180,00	33.790.266.337,61	717.175.842,38	97,92
4.	Belanja modal	226.243.160.700,00	224.844.597.360,00	1.398.563.340,00	99,38
	Jumlah	271.311.339.000,-	268.449.066.006,61,-	2.862.272.993,39	98,94

Sumber : Laporan Keuangan Dinas PU TA.2017

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun 2017 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP juga berperan sebagai kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government*. Dalam implementasi perspektif yang lebih luas, maka LKIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh stakeholder.

Berdasarkan hasil penghitungan capaian kinerja sasaran dari 11 indikator kinerja untuk mencapai 8 sasaran diperoleh rata-rata capaian sasaran pada tahun 2017 sebesar 103,94% (sangat berhasil) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 268.449.066.006,61,- atau 98,94%. Guna lebih meningkatkan lagi capaian kinerja instansi maka beberapa hambatan berikut perlu diantisipasi, yaitu:

- Masih kurangnya tenaga terampil dibidang keahlian khusus terhadap kinerja masing-masing.
- Masih terbatasnya sarana (alat bantu) kerja dalam mendukung pelaksanaan konstruksi.
- Terbatasnya dana pemerintah sehingga pembangunan belum dapat merata.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2017, maka perlu :

- Mengirimkan/mengikutsertakan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat guna mengikuti pendidikan dan pelatihan (kursus).
- Menambah dan mengadakan sarana (alat kerja) pendukung yang masih kurang dan saat ini dibutuhkan untuk memperlancar konstruksi.
- Mencari tambahan dana guna menunjang keterbatasan dana alokasi Pemerintah dengan melakukan sinergi dengan pemerintah propinsi dan pusat.

Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 ini, diharapkan laporan ini dapat bermanfaat sebagai masukan/arahan guna optimalisasi dan peningkatan atas hasil kinerja dalam pelaksanaan tugas sehingga penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan serta berkesinambungan.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Ir. AGUS YUWONO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19590814 198812 1 001

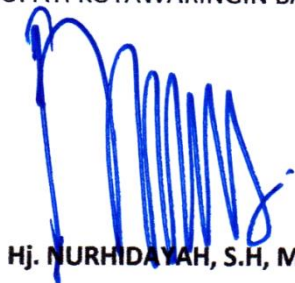
LAMPURAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	7	8
1	Peningkatan kualitas pelayanan kinerja aparatur	Persentase realisasi fisik kegiatan	100	%
2	Peningkatan kualitas layanan kota-desa melalui peningkatan infrastruktur jalan kabupaten	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	77,57	%
3	Peningkatan konektivitas wilayah di kabupaten	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (Konektifitas) di kabupaten	77,46	%
4	Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	77	%
		Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	85	%
		Presentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (>30 cm selama 2 jam, >2 kali setahun	75	%
5	Berkurangnya permukiman kumuh diperkotaan	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh diperkotaan	72,60	%
6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Irigasi terpadu	Jumlah kawasan Daerah irigasi dan daerah Irigasi Rawa yang ditangani	20	DI+DIR
7	Meningkatkan kapasitas tampung sumber - sumber air	Jumlah embung dan bangunan penampung air yang ditangani	8	embung
8	Meningkatnya kapasitas pengendali daya rusak air dan Meningkatnya upaya konservasi sumber daya air	Jumlah Sungai yang ditangani	9	Sungai
		Jumlah kawasan banjir dan pantai yang ditangani	7	Kawasan

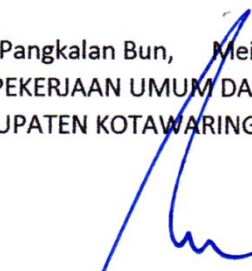
PROGRAM			ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	3.507.886.600,00	APBD
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp	2.979.221.400,00	APBD
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp	107.250.000,00	APBD
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp	165.000.000,00	APBD
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	3.037.500,00	APBD
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp	145.848.309.600,00	APBD/APBN
7	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rp	11.344.000.000,00	APBD
8	Program Pembangunan turap/talud/brojong	Rp	1.636.303.400,00	APBD
9	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp	3.722.642.800,00	APBD
10	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Rp	200.000.000,00	APBD
11	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Rp	1.158.102.800,00	APBD
12	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rp	26.411.485.200,00	APBD/APBN
13	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya lainnya	Rp	1.865.475.000,00	APBD
14	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Rp	10.366.688.800,00	APBD/APBN
15	Program pengendalian banjir	Rp	5.629.048.400,00	APBD
16	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Rp	7.615.560.000,00	APBD
17	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Rp	10.298.901.500,00	APBD
JUMLAH		Rp	232.858.913.000,00	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

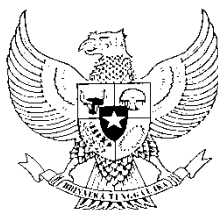


Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H

Pangkalan Bun, Mei 2017
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Ir. AGUS YUWONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590814 198812 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Ir. AGUS YUWONO, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kotawaringin Barat.

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

N a m a : Hj. NURHIDAYAH, S.H, M.H
Jabatan : BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan bun, Mei 2017

Pihak Kedua,

Hj. NURHIDAYAH, S.H, M.H.

Pihak Pertama,

Ir. AGUS YUWONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590814 198812 1 001

PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA

1. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang

Cara Perhitungan SPM Kondisi Jalan:

$$\frac{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Panjang jalan memenuhi kondisi jalan baik dan sedang (Km)}}{\sum_{\text{eksisting}} \text{Panjang jalan Kabupaten (Km)}}$$

- Nama = Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
- Panjang jalan (eksisting) kabupaten Kobar = 1222.845 Km
- Rencana panjang jalan kondisi baik dan sedang hingga tahun 2017 = 60% X 1222.845 Km = 733.707 Km
- Realisasi panjang jalan kondisi baik dan sedang hingga tahun 2017 = 985.87 Km (melebihi ambang batas 733.707 km)
- Artinya, Kabupaten Kobar berhasil mencapai target standar pelayanan minimal penyediaan jalan.
- SPM Kondisi Jalan :

$$\text{SPM} = \frac{985.87 \text{ Km}}{60\% \times 1222.845} = \frac{985.87 \text{ Km}}{733.707} = 134.37 \%$$

2. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (Konektifitas) di kabupaten

Cara Perhitungan SPM Konektivitas Wilayah

$$\frac{\sum_{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Panjang jalan penghubung pusat – pusat kegiatan dan pusat produksi (Km)}}{\sum_{\text{target keseluruhan}} \text{Panjang jalan penghubung pusat – pusat kegiatan dan pusat produksi (Km)}}$$

- Nama = Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
- Panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (existing) = 1222.845 Km
- Target panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi hingga tahun 2017 = 1711.565 Km
- Realisasi Konektifitas wilayah hingga tahun 2017 = 71.44 %
- SPM konektifitas wilayah :

$$SPM = \frac{1222,845}{1711.565} = 71,44 \%$$

3. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

Cara Perhitungan SPM

$$= \frac{\text{Masyarakat terlayani air minum (jiwa)}}{\text{Proyeksi total Masyarakat (jiwa)}} \times 100\%$$

- Masyarakat terlayani air minum = 118.584 jiwa
- Proyeksi total Masyarakat = 177.521 jiwa
- Pencapaian SPM :

$$= \frac{118.584 \text{ jiwa}}{177.521 \text{ jiwa}} \times 100\%$$

$$= 66,8 \%$$

4. Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai

Cara Perhitungan SPM

$$= \frac{\text{Jumlah Penduduk yang terlayani tangki septik / MCK (jiwa)}}{\text{Jumlah total penduduk seluruh Kabupaten (Jiwa)}} \times 100\%$$

- Jumlah Penduduk yang terlayani tangki septik / MCK = 150.076 jiwa
- Jumlah total penduduk seluruh Kabupaten = 177.521 jiwa
- Pencapaian SPM :
$$= \frac{150.076 \text{ jiwa}}{177.521 \text{ jiwa}} \times 100\%$$

$$= 84,5 \%$$

5. Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (> 30 cm selama 2 jam, > 2 kali setahun)

Cara Perhitungan SPM

$$= \frac{\text{Jumlah Penduduk yang rumahnya terlayani sistem drainase (jiwa)}}{\text{Jumlah total penduduk seluruh Kabupaten (Jiwa)}} \times 100\%$$

- Jumlah Penduduk yang rumahnya terlayani sistem drainase = 136.159 jiwa
- Jumlah total penduduk seluruh Kabupaten = 177.521 jiwa
- Pencapaian SPM :
$$= \frac{131.159 \text{ jiwa}}{177.521 \text{ jiwa}} \times 100\%$$

$$= 76,7 \%$$

6. Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh diperkotaan

Cara Perhitungan SPM

$$= \frac{\text{Permukiman kumuh yang tertangani di Kabupaten (Ha)}}{\text{Total permukiman kumuh yang telah ditetapkan di Kabupaten (Ha)}} \times 100\%$$

- Permukiman kumuh yang tertangani di Kabupaten = 104,37 Ha
- Total permukiman kumuh yang telah ditetapkan di Kabupaten = 160,58 Ha
- Pencapaian SPM :

$$= \frac{104,37 \text{ Ha}}{160,58 \text{ Ha}} \times 100\%$$

= 65 %

